

BAB IV

KESIMPULAN

Masuknya peradaban Islam ke Prancis berawal pada tahun 1914-1918, di mana saat itu Prancis membutuhkan tenaga kerja untuk membangun kembali wilayahnya yang terkena dampak Perang Dunia I. Pada saat itu, imigran Muslim yang datang ke Prancis kebanyakan berasal dari Wilayah Magreb yaitu Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Pada awalnya masyarakat Prancis terbuka dengan kedatangan para imigran Muslim karena mereka membutuhkan pendatang sebagai buruh untuk membangun infrastruktur yang rusak pasca perang. Namun, masyarakat Prancis merasa khawatir ketika arus imigran semakin tinggi dan para imigran tersebut membentuk kelompok-kelompok imigran di daerah tempat mereka bekerja serta menampilkan ciri dan budaya mereka. Masyarakat lokal Prancis khawatir keberadaan imigran yang membawa kebudayaan berbeda akan mengancam nilai-nilai dan budaya Prancis. Disisi lain, masyarakat lokal Prancis tidak siap menghadapi situasi tersebut dan cenderung menolak perubahan yang sebenarnya adalah hal yang wajar sebagai bagian dari dinamika bermasyarakat.

Kehadiran umat Islam pada akhirnya menjadi fenomena yang mendorong evaluasi serius terhadap prinsip-prinsip politik Prancis "*Liberte, Egalite, Fraternite*" yang dimasukkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip Republik dalam konstitusi Prancis. Prinsip "*Liberte, Egalite, Fraternite*" ini dianggap sebagai "perlindungan yang aman" dari identitas kewarganegaraan Prancis. Namun, yang terjadi di Prancis saat ini justru kebalikan dari prinsip tersebut, yang bisa diekspresikan dalam istilah "ketimpangan, perpecahan, dan penyalahgunaan kekuasaan." Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Prancis mengeluarkan aturan *French Immigration and Integration Law*, yang mengatur imigran yang boleh masuk dan tinggal di Prancis. Ada tiga pokok-pokok utama yang terkandung dalam undang-undang imigrasi dan integrasi Prancis. Poin pertama, mengatur untuk setiap individu yang ingin tinggal bahkan hidup di wilayah Prancis. misalnya adalah saat ada individu yang ingin membawa keluarganya ke wilayah Prancis maka setidaknya individu tersebut sudah tinggal selama minimal 18 bulan di Prancis serta sanak keluarganya yang akan dibawa harus direunifikasi oleh pemerintah Prancis supaya dapat masuk ke wilayah tersebut. Poin kedua, menjelaskan bahwa untuk menjadi warga negara Prancis maka setiap imigran harus melewati berbagai proses yang sudah disusun oleh pemerintah Prancis yaitu kemauan dan keinginan yang ditunjukkan dengan 'mendemonstrasikan' dirinya terhadap publik

dengan sungguh-sungguh serta setelah itu menandatangani hubungan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Prancis. Poin ketiga, menjelaskan bahwa imigran yang ingin masuk ke daerah Prancis berasal dari negara yang memiliki hubungan ‘baik’ dengan Prancis. Baik disini dimaksudkan ialah negara asal memberi keuntungan strategis baik itu ekonomi juga politik terhadap negara Prancis.

Disisi lain, narasi tentang Islamofobia merupakan nilai jual utama dalam banyak kampanye kelompok politik di Prancis. Narasi yang diusung antara lain terkait dengan “invasi” imigran Muslim yang akan memusnahkan eksistensi bangsa kulit putih dan peradaban Yahudi-Kristen Eropa. Dengan kata lain, sebagian besar politisi sayap kanan berasumsi bahwa masuknya imigran Muslim akan meningkatkan jumlah teroris dan tindakan kriminal lainnya di kawasan Eropa. Sebagai salah satu negara di Eropa, Prancis juga terkena dampak dari adanya penyebaran isu Islamofobia. Penyebab terjadinya Islamofobia di Prancis sendiri berawal dari adanya ketakutan, kecurigaan, dan kebencian dari tingginya gelombang migrasi yang datang dari negara-negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Khususnya setelah peristiwa 11/9, penduduk asli Prancis kulit putih menginginkan imigran Muslim meninggalkan Prancis karena ketakutan mereka terhadap Islam dan hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Hal ini bertambah parah dengan kejadian terorisme pada tahun 2015, di mana 12 orang meninggal dunia akibat adanya serangan teroris yang terjadi di kantor Charlie Hebdo. Pasca penyerangan tersebut, mobilisasi gerakan politik sayap kanan melawan Muslim menjadi lebih kuat dari sebelumnya.

Hal ini berdampak pada keamanan komunitas Muslim Prancis. Tindakan-tindakan Islamofobia yang diarahkan dan ditunjukkan terhadap umat Islam semakin banyak terjadi. Dengan menggunakan analisis *Human Security*, khususnya dalam bagian keamanan komunitas, ancaman-ancaman yang dilakukan kepada komunitas Muslim Prancis tentunya mengancam keberadaan dan keberlangsungan komunitas Muslim Prancis. Di mana seharusnya komunitas Muslim Prancis dapat menikmati dan merasakan *freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut) dan *freedom from want* (kebebasan dari kekurangan), dengan memastikan bahwa komunitas Muslim Prancis bebas dari rasa takut dan kekurangan, serta identitas mereka dijamin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh CCIF (*The Collective Against Islamophobia in France*) pada 2015–2019, Islamofobia di Prancis mengalami peningkatan. Meski pada tahun 2016-2017 sempat mengalami penurunan, namun aksi Islamofobia kembali meningkat dari tahun 2017,

2018 dan 2019. Meningkatnya Islamofobia dalam 3 tahun terakhir tidak lepas dari pengaruh Front Nasional sebagai basis sayap kanan Prancis yang masuk pemerintahan pada pemilihan presiden 2017. Marine Le Pen sebagai tokoh dari Front Nasional memiliki peran penting dalam politisasi Xenophobia dan Islamophobia ke ruang publik dengan seruan anti-Islam karena telah mengganggu kemurnian nilai-nilai Prancis

Jelas bahwa fenomena Islamofobia di Prancis tidak hanya menjadi ancaman bagi komunitas Muslim di Eropa, tetapi juga mempengaruhi keamanan dan stabilitas di negara-negara Eropa. Komunitas Muslim adalah korban utama dari munculnya kelompok ekstremis sayap kanan di Eropa. Serangan teror yang dilakukan oleh kelompok ekstremis sayap kanan ini jelas menunjukkan sikap anti-Muslim dari kelompok-kelompok tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh CCIF pada tahun 2015-2019 menunjukkan validitas bahwa fenomena Islamofobia berpengaruh terhadap keamanan komunitas Muslim di Prancis. Di mana pemerintahan sentris saat ini dapat dianggap gagal dalam memberikan perlindungan terhadap komunitas minoritas Muslim di Prancis dan dianggap sebagai kegagalan dari pemerintahan sentris saat ini.

